



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : SP DIPA-077.01-0/2015**



A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 3. PAGU | : | Rp.214.503.011.000 |
- (DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEBELAS RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
6. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014
A. N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ASKOLANI
NIP.196606111992021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015**



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA :	077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI :	077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU :	Rp.214.503.011.000 (DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEBELAS RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	156.626.098
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	15.381.950
	06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	33.497.263
	07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	8.997.700
2. SASARAN STRATEGIS	01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses	
	02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK	
	03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK	
	04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	
	05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya	
	06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya	
	07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan	
	08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi	
	09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat	
	10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat	
	11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif	
	12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu	
	13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik	
	14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran	
3. FUNGSI SUB FUNGSI	01	PELAYANAN UMUM	172.008.048
	0101	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	172.008.048
	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
	0303	PEMBINAAN HUKUM	8.997.700
	0304	PERADILAN	33.497.263

P 2



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 7

4. PRIORITAS	:		214.503.011
Non Prioritas	:	0 0 Non Prioritas	43.564.871
Prioritas Bidang	:	B 08 Bidang Hukum dan Aparatur	5.690.612
Prioritas Kementerian/Lembaga	:	KL 0 Prioritas Kementerian/Lembaga	165.247.528



Jakarta, 14 November 2014
SEKRETARIS JENDERAL

Janedjri M. Gaffar
JANEDJRI M. GAFFAR
NIP 196310251988021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015**



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
077.01.01	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI</p> <p>Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses</p> <p>Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK</p> <p>Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi umum dan proses layanan umum yang moderen dan terpercaya</p> <p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik</p> <p>Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran</p> <p>Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat</p> <p>Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk meningkatnya layanan keamanan dan ketertiban gedung kantor dan rumah jabatan MK</p> <p>Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu</p> <p>Meningkatnya Kualitas Kajian Perkara Konstitusi dan Penelitian yang berkaitan dengan Isu-Isu Hukum, Konstitusi dan Ketatanegaraan</p> <p>01 Persentase program kerja yang terlaksana sesuai dengan rencana</p> <p>02 Tingkat disiplin kerja pegawai</p> <p>03 Tingkat Pencapaian Kinerja MK</p> <p>04 Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asset yang Berada di Rumah Jabatan MK</p> <p>05 Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Ruang Persidangan</p> <p>06 Tingkat pencapaian kinerja MK</p> <p>07 Persentase Penyusunan Laporan Kepaniteraan secara Periodik</p> <p>08 Rata-rata Waktu Upload Risalah ke Laman www.mahkamahkonstitusi.go.id</p> <p>09 Rata-rata jumlah Pelaksanaan Penyusunan PMK dan Petunjuk Teknis</p> <p>10 Persentase Penelaahan Permohonan Kerjasama</p> <p>11 Rata-rata Waktu Upload (unggah) Putusan Laman Mahkamah Konstitusi setelah Sidang Pembicaraan Putusan Selesai</p> <p>12 Prosentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK</p> <p>13 Persentase Penyelesaian Bantuan Hukum Internal</p> <p>14 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan MK</p> <p>15 Jumlah Kegiatan Pelayanan Pimpinan MK dalam Kegiatan Nonpersidangan di Pusat dan Daerah</p> <p>16 Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Terbina</p> <p>17 Persentase Pengiriman Naskah dan Paket Dinas Lewat Pos</p>		156.626.098

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	18 Jumlah Pedoman Kearsipan 19 Persentase Pembinaan Arsip di Unit Kerja 20 Frekuensi Arsip yang diserahkan ke ANRI 21 Kecepatan Penyampaian/Pendistribusian Surat Masuk 22 Persentase pemenuhan layanan akomodasi 23 Persentase layanan penggunaan kendaraan operasional untuk kepentingan dinas 24 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 25 Rata-rata waktu penyelesaian layanan kebersihan dan mekanikal elektrikal gedung kantor dan rumah jabatan MK 26 Jumlah laporan pengelolaan BMN		
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah - Jumlah Bahan Publikasi Konstitusi dan MK - Jumlah Kegiatan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK - Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan - Jumlah Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri - Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial - Jumlah Peraturan MK dan Petunjuk Teknis		46.479.277
3366.001	Publikasi Konstitusi dan MK	KL 0 12.0000 Paket	5.532.889
3366.003	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	KL 0 5.0000 Paket	747.878
3366.004	Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	KL 0 6.0000 Paket	32.446.260
3366.010	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	KL 0 3.0000 Paket	7.752.250
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana - Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran - Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		4.384.480
3367.007	Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran	0 0 9.0000 Dokumen	3.146.092
3367.008	Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0 0 4.0000 Kegiatan	1.238.388
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi - Jumlah Kegiatan Kearsipan - Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan		52.000.292

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

21



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015**



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3369.002	- Jumlah Layanan Perkantoran Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	KL 0	8.0000 Paket	834.810
3369.003	Kegiatan Kearsipan	0 0	4.0000 Paket	1.626.040
3369.994	Layanan Perkantoran	KL 0	12.0000 Bulan Layanan	49.539.442
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian			53.762.049
	- Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM			
	- Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran			
	- Jumlah Layanan Perkantoran			
5238.001	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM	KL 0	13.0000 Kegiatan	7.251.789
5238.002	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	KL 0	2.0000 Kegiatan	212.991
5238.994	Layanan Perkantoran	KL 0	12.0000 Bulan Layanan	46.297.269
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi Tersedianya Sarana Organisasi dalam Jumlah yang Optimal dan Kualitas yang Semakin Meningkat 01 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 02 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 03 Persentase Sarana yang diperbaharui dan direhabilitasi 04 Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja (Meja, Kursi, Komputer, Seragam, ATK, dll)			15.381.950
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana			750.000
	- Jumlah Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara			
3370.003	Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara	0 0	1.0000 Paket	750.000
3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung			14.631.950
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
3371.001	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KL 0	6.0000 Paket	14.631.950
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di Mahkamah Konstitusi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Peradilan dan Proses Pelayanan Peradilan yang Modern dan Terpercaya			33.497.263

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015**



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	01 Indeks pelayanan penanganan perkara di MK 02 Persentase jumlah perkara PPHU Pemilukada yang diputus 03 Indeks pelayanan pada masyarakat terhadap teknis administratif peradilan di MK 04 Persentase Penyelesaian Berita Acara Persidangan 05 Penyiapan Bahan Penyusunan konsep Putusan yang tepat waktu 06 Pemeriksaan Akhir Format dan Penulisan Konsep Duduk Perkara Putusan yang tepat waktu 07 Penyelesaian Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu 08 Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang tepat waktu 09 Penyelesaian Telaahan Permohonan Perkara yang tepat waktu 10 Penyelesaian Telaahan Akhir Perkara yang tepat waktu 11 Penyelesaian Notulasi RPH yang tepat waktu 12 Persentase jumlah Pelayanan Konsultasi Pengajuan Permohonan secara langsung/online 13 Penyelesaian Pemeriksaan Berkas Permohonan yang tepat waktu 14 Pemberitahuan kekuranglengkapan Berkas Perkara oleh Pemohon yang tepat waktu 15 Registrasi Permohonan Langsung/ Online yang tepat waktu 16 Penyelesaian Penyusunan Resume Permohonan dan Keterangan Lainnya Terkait dengan Perkara yang tepat waktu 17 Pengembalian Dokumen Perkara tidak Diregistrasi/ Ditarik Kembali Permohonan yang tepat waktu 18 Pendistribusian Dokumen Perkara yang tepat waktu 19 Penjadwalan Sidang pertama yang tepat waktu 20 Penyiapan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persidangan yang tepat waktu 21 Penyampaian panggilan Sidang, Salinan Dokumen Perkara dan Salinan Putusan yang tepat waktu 22 Rata-rata Waktu Penyelesaian Risalah Persidangan 23 Rata-Rata waktu Terlayani Permohonan untuk Permintaan Salinan Putusan Dilegalisasi dan Risalah Sidang 24 Rata-Rata Waktu Pemuatan Putusan yang dikabulkan dalam Berita Negara		
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya - Jumlah Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus - Jumlah Penanganan Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota		33.497.263
3372.001	Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	B 08 116.0000 Perkara	5.690.612

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 7 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT		VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
3372.004	Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	00	5.0000 Paket	3.470.775
3372.005	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	00	2.0000 Peraturan	450.000
3372.006	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	00	10.0000 Paket	23.885.876
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 01 Jumlah kurikulum pendidikan 02 Jumlah Pedoman Kegiatan Pendidikan 03 Jumlah pedoman rekrutmen widyaiswara dan peserta didik 04 Jumlah Informasi Pendidikan 05 Jumlah modul pendidikan			8.997.700
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK - Jumlah Dokumen Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara - Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara - Jumlah Kegiatan Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK			8.997.700
3373.001	Dokumen Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	00	3.0000 Dokumen	562.500
3373.002	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	00	10.0000 Kegiatan	8.435.200

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 14 November 2014
SEKRETARIS JENDERAL





DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.214.503.011.000
(DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEBELAS RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	KP	30.613.005	126.013.093	0	0	156.626.098	11.754.700
	01	DKI JAKARTA		30.613.005	126.013.093	0	0	156.626.098	11.754.700
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		30.613.005	126.013.093	0	0	156.626.098	11.754.700
	A00	RM Target Pendapatan		30.613.005	126.013.093	0	0	156.626.098	11.754.700
	077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	KP	0	0	15.381.950	0	15.381.950	0
	01	DKI JAKARTA		0	0	15.381.950	0	15.381.950	0
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		0	0	15.381.950	0	15.381.950	0
	A00	RM	0	0	15.381.950	0	15.381.950	0	
	077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	KP	0	33.197.263	300.000	0	33.497.263	0
	01	DKI JAKARTA		0	33.197.263	300.000	0	33.497.263	0
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		0	33.197.263	300.000	0	33.497.263	0
	A00	RM	0	33.197.263	300.000	0	33.497.263	0	
	077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	KP	0	8.997.700	0	0	8.997.700	0
	01	DKI JAKARTA		0	8.997.700	0	0	8.997.700	0
	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI		0	8.997.700	0	0	8.997.700	0
	A00	RM	0	8.997.700	0	0	8.997.700	0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.214.503.011.000
(DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEBELAS RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
		TOTAL		30.613.005	168.208.056	15.681.950	0	214.503.011	11.754.700
		RM		30.613.005	168.208.056	15.681.950	0	214.503.011	11.754.700
		PENDAPATAN						913.982	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 14 November 2014
SEKRETARIS JENDERAL


Janed
JANEDJRI M. GAFFAR
NIP 196310251988021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : DIPA-077.01-0/2015



DS:0004-2832-8510-4797

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. UNIT ORGANISASI : 077.01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
3. PAGU : Rp.214.503.011.000
(DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR LIMA RATUS TIGA JUTA SEBELAS RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI RENCANA PENARIKAN DANA	156.626.098	2.947.119	4.386.017	6.488.868	9.421.907	9.673.720	11.781.258	16.892.984	16.294.531	18.378.007	16.843.660	19.573.220	23.944.807
2	077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI RENCANA PENARIKAN DANA	15.381.950	63.066	476.840	626.045	621.431	647.580	798.323	1.324.386	1.527.428	1.741.237	1.390.528	1.805.841	4.359.245
3	077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi RENCANA PENARIKAN DANA	33.497.263	306.645	686.524	1.200.672	1.831.330	1.924.792	2.140.195	3.714.046	3.618.414	3.924.679	3.997.513	4.480.334	5.672.119
4	077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara RENCANA PENARIKAN DANA	8.997.700	82.779	183.553	322.118	493.074	518.268	575.853	999.644	972.651	1.054.530	1.076.125	1.204.792	1.514.313
5	077.01	PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	913.982	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.167
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	214.503.011	3.399.609	5.732.934	8.637.703	12.367.742	12.764.360	15.295.629	22.931.060	22.413.024	25.098.453	23.307.826	27.064.187	35.490.484
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	913.982	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.165	76.167

Jakarta, 14 November 2014
SEKRETARIS JENDERAL

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 196310251988021001